BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak organisasi menghabiskan paling sedikit satu pertiga dari keseluruhan anggaran untuk pengadaan barang/jasa tak terkecuali pengadaan pada sektor publik yang pada umumnya termasuk bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah selain dari gaji pemerintah dan tunjangan sosial. Menurut Darminto (2000), dalam penelitiannya berkenaan dengan kinerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa menyebutkan bahwa masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai sebagai salah satu dimensi capaian kinerja, yaitu berkaitan dengan tranparansi penyelenggaraan proses pengadaan barang dan jasa. Sejalan dengan fakta ini, maka sangat dimungkinkan sekali pengadaan barang dan jasa diselenggarakan melalui sebuah system yang benar-benar efektif melalui layanan pengadaan secara elektronik (e-*procurement*).

E-procurement termasuk salah satu alat pengadaan barang/jasa online yang dapat digunakan instansi pemerintah dalam mengontrol pengeluaran instansi pemerintah sampai akhirnya juga diharapkan oleh banyak pihak dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik pada sektor pemerintahan seperti meningkatkan transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. *E-procurement* dapat menjadi alat untuk mencapai tatakelola pemeritah yang baik karena *e-procurement* memberikan kesempatan untuk semua pihak turut terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa secara virtual baik dengan melakukan tender

maupun mengawasi proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah.

Pengembangan *E-procurement* dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) *Copy To Internet* yaitu kegiatan penayangan seluruh proses dan hasil pengadaan barang/jasa, ditayangkan melalui internet (sistem lelang) oleh panitia pengadaan; (2) Semi *E-procurement* yaitu kegiatan pengadaan barang/ jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media elektronik (internet) secara interaktif antara pengguna jasa dan penyedia jasa dan sebagian lagi dilakukan secara manual (konvensional); (3) *Full E-procurement* yaitu proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan cara memasukkan dokumen (file) penawaran melalui sistem *E-procurement*, sedangkan penjelasan dokumen seleksi/lelang masih dilakukan secara tatap muka antara pengguna jasa dengan penyedia jasa. Adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya dukungan finansial, dimana beberapa instansi dan penyedia jasa lebih nyaman dengan sistem sebelumnya, kurang dukungan dari tingkat atas manajemen, belum meratanya keterampilan dan pengetahuan tentang *e-procurement*, serta jaminan sistem keamanan atas *e-procurement* itu sendiri (Sriyanto, 2017).

Penyebab hambatan sistem *e-procurement* dapat ditelaah lebih lanjut dan dilihat dari sisi peraturan perundangan, sumber daya manusia dan perangkat keras dan infrastruktur jaringan. Dengan adanya sistem *e-procurement* ini, maka kinerja institusi pemerintahan yang ada diharapkan akan meningkat, karena pembelian dibuat dengan memilih item-item yang ada didalam sistem sehingga dapat mengurangi kecenderungan kesalahan. Semua tender pemilihan barang dan jasa

pemerintah dilakukan secara online melalui internet sehingga proses menjadi efektif dan efisien serta transparan. Hal tersebut yang sudah dipaparkan secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja proses operasional yang berada dalam lembaga tersebut.

Kinerja yang baik, khususnya dalam bidang pengadaan akan mendukung proses berjalannya transparansi dan persaingan yang sehat antar penyedia barang dan jasa juga bagi aparatur pemerintah, sehingga mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dan kepercayaan yang dibutuhkan juga akan mempengaruhi proses penerapan aplikasi *e-procurement* dalam memberikan dampak kepada keikutsertaan *e-marketplace* didalamnya.

Pada lingkungan Kabupaten Dharmasraya dalam upaya membangun pemerintahan yang baik dan transparan telah dilakukan berbagai upaya, seperti diantaranya peningkatan Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa. Peningkatan Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa juga diterapkan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan program kerja dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan secara bertanggung jawab dan bersih sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijaksanaan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Beberapa kebijakan daerah dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan sumber daya yang ada, agar menghasilkan Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa yang optimal. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa yang ada masih rendah yang ditunjukkan dengan adanya data

riwayat proses pengadaan barang dan jasa khususnya dari waktu penyelenggaran lelang seperti disajikan pada gambar 1.1 dibawah ini.

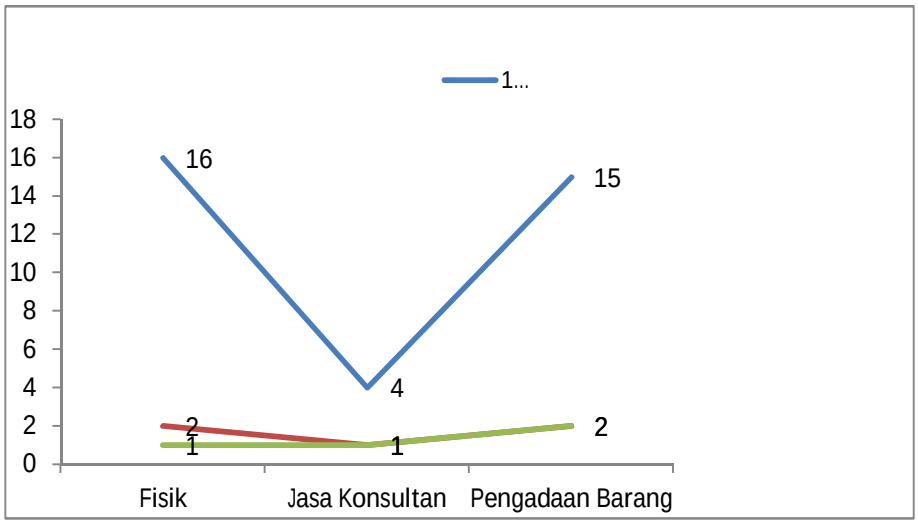

Gambar 1.1
Presentase Kesuksesan Lelang Paket Pekerjaan Tahun 2018
(Sumber : UKPBJ Dharmasraya, 2018)

Hal ini dapat dilihat dari fenomena pegawai yang ada diketahui belum semua pegawai memiliki komitmen yang kuat terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa seperti beberapa pegawai memiliki kemampuan yang lemah dalam melaksanakan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sesuai target waktu.

Hasil survey awal yang dilakukan menemukan beberapa kondisi yang dapat dijadikan dasar bahwa penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa hingga saat ini masih belum sesuai yang diharapkan, misalnya praktek organisasi yang belum terlaksana dengan baik yang dibuktikan dengan adanya penilaian dari pelaksana pengadaan yang melakukan proses seleksi pemenang dengan nilai penawaran terendah, sementara penawaran tertinggi tidak dievaluasi.

Disamping praktek organisasi yang belum terlaksana dengan baik, pada penelitian awal juga ditemukannya indikasi rendahnya motivasi pelaksana pengadaan barang dan jasa. Temuan terkait dengan motivasi yang masih rendah terlihat dari pelaksanaan rangkaian/tahapan pengadaan yang cenderung mendekati batas waktu yang telah ditetapkan, meskipun setiap tahapan telah ditetapkan secara ketat waktu yang disediakan.

Dimensi capaian kinerja lainnya juga akan sangat ditentukan dengan factor Higher Order Skills, keterampilan pelaksana dalam proses mengambil sebuah keputusan yang masih terkendala dengan hal-hal yang sifatnya operasional. Dalam prakteknya, kemampuan pelaksana pengadaan barang dan jasa juga akan menjadi bagian dalam efektifitas waktu yang disediakan sesuai jadwal yang telah diatur.

Hasil penelitian sementara melalui penjajakan opini terhadap 15 responden yang mewakili UKPBJ baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota menjelaskan bahwa capaian kinerja UKPBJ terkait dengan kualitas layanan masih didapatkan beberapa UKPBJ belum mencapai sasaran yang diinginkan yaitu sebesar 26.7% responden menyatakan indicator kualitas ini masih berada pada capaian rendah (Sumber : Hasil Survey Awal, 2020).

Terkait dengan capaian tingkat kepuasan penyedia, 15 UKPBJ memberikan fakta bahwa untuk parameter ini masih diperlukan perbaikan-perbaikan yang memiliki peran pada capaian kinerja secara keseluruhan, Selanjutnya untuk capaian tingkat penyerapan anggaran terlihat bahwa secara keseluruhan UKPBJ yang ada masih belum tercapai dengan baik.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut berikut :

a) Apakah *E-Procurement* pengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
b) Apakah *Praktek Organisasi* pengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
c) Apakah *Motivasi* pengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
d) Apakah *Higher Order Skills* pengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Pengadaan Barang dan Jasa.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Penelitian ini bertujuan untuk

a) Menentukan besarnya pengaruh Penerapan *E-Procurement* terhadap keberhasilan dan capaian kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
b) Menentukan besar pengaruh *Praktek Orgnanisasi* terhadap keberhasilan dan capaian kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa .
c) Menentukan besar pengaruh Motivasi terhadap keberhasilan dan capaian kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.

d) Menentukan besar pengaruh *Higher Order Skills* terhadap keberhasilan dan capaian kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.

1.3.2 Sementara manfaat yang akan didapat nantinya adalah sebagai berikut:

a) Tersedianya informasi tentang dimensi apa saja yang harus dibenahi dari *E-Procurement* untuk dapat meningkatkan kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa .

b) Tersedianya informasi tentang dimensi/parameter *Praktek Organisasi* yang harus dimaksimlakan dalam upaya peningktan kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa .

c) Tersedianya informasi tentang dimensi Motivasi dan Higher Order Skills apa saja yang harus ditingkatkan untuk mencapai kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.

d) Tersedianya kontribusi keilmuan yang baru terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka memperbaiki kinerja capaian fungsi organisasi.